



KEMENTERIAN HUKUM
KANTOR WILAYAH
KALIMANTAN SELATAN

bangga
melayani
bangsa



Kemenkum Kalsel News

E-Buletin Edisi Pekan Ketiga November



157 Desa/Kelurahan Tanah Bumbu Terima STR Posbankum Kemenkum



Kemenkum Kalsel Musnahkan 34.100 Arsip Substantif



Kemenkum Kalsel Serahkan Merek UMKM Tabalong



Kunjungi laman kami



kalsel.kemenkum.go.id

Terhubung lebih dekat:



YouTube



kemenkumkalsel

17 November 2025

Kanwil Kemenkum Kalsel Gelar Apel Pagi, Tekankan Disiplin Berpakaian dan Peningkatan Kinerja Pegawai



Banjarmasin, Humas_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan kembali melaksanakan Apel Pagi pada Senin, 17 November 2025, bertempat di halaman Kanwil Kemenkum Kalsel dan diikuti oleh Kepala Kantor Wilayah, Alex Cosmas Pinem dan Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan, Anton Edward Wardhana serta seluruh jajaran pegawai.

Apel dipimpin oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan Muda, Eka Sari, dengan Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, Riswandi, bertindak sebagai pembina apel. Dalam amanatnya, Riswandi menyampaikan dua hal penting yang menjadi perhatian seluruh pegawai. Pertama, ia menegaskan aturan terbaru mengenai penggunaan seragam, bahwa setiap tanggal 17 seluruh ASN wajib menggunakan seragam Korpri, sesuai Surat Edaran yang baru diterbitkan.

Selanjutnya, Riswandi memberikan dorongan kepada seluruh pegawai agar terus meningkatkan kinerja, bekerja dengan penuh tanggung jawab, serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Ia menekankan bahwa komitmen ini merupakan bagian dari upaya bersama dalam menjaga reputasi dan kualitas layanan Kanwil Kementerian Hukum di Kalimantan Selatan.

Apel berlangsung dengan tertib, khidmat, dan menjadi momentum untuk memperkuat kedisiplinan serta semangat kerja seluruh jajaran Kanwil Kemenkum Kalsel.



17 November 2025

Kemenkum Kalsel Gelar Coffee Morning Bahas Persiapan Rakor AHU dan Capaian Kinerja Kanwil



Banjarmasin, Humas_Info - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan menggelar kegiatan Coffee Morning sebagai wadah koordinasi internal dan penguatan kebersamaan, Senin (17/11/2025). Dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah, Alex Cosmas Pinem, kegiatan ini diikuti jajaran Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Manajerial, serta Pejabat Non-Manajerial, dan dilaksanakan di Taman WBK Kanwil Kemenkum Kalsel.

Dalam suasana santai dan terbuka, jajaran Kanwil membahas persiapan Rapat Koordinasi Bidang Administrasi Hukum Umum (AHU). Kakanwil menekankan pentingnya memastikan data dan materi sudah lengkap, sekaligus menyiapkan strategi penyampaian substansi agar pelaksanaan rakor berjalan lancar. Persiapan ini juga mencakup evaluasi layanan AHU seperti pelaporan ormas, kewarganegaraan, fidusia, wasiat, hingga pelayanan notaris.

Kakanwil Alex Cosmas Pinem menyampaikan bahwa seluruh materi harus disiapkan secara akurat dan mutakhir, sehingga rakor dapat menghasilkan rumusan yang selaras dengan kebijakan Kementerian Hukum.

Selain persiapan rakor, Coffee Morning juga menjadi kesempatan untuk berbincang santai mengenai capaian kinerja Kanwil Kemenkum Kalsel. Setiap bidang menyampaikan perkembangan kegiatan mereka secara singkat dan ringan, mulai dari program yang sudah berjalan baik, inovasi layanan yang mulai berdampak, hingga progres anggaran yang terus dioptimalkan.



Kakanwil mengapresiasi semangat kerja seluruh jajaran yang terus menjaga konsistensi kinerja positif. Ia mendorong agar kolaborasi tetap dipertahankan, terutama dalam menghadapi target akhir tahun dan menjaga kualitas pelayanan publik.

Melalui agenda rutin Coffee Morning ini, Kanwil Kemenkum Kalsel berharap kekompakan dan koordinasi antarbidang semakin solid dalam menghadapi Rakor AHU serta berbagai agenda strategis lainnya di lingkungan Kementerian Hukum.



17 November 2025

Kemenkum Kalsel Ikuti Monev RKT-RB Triwulan IV B12



Banjarmasin, Humas_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan mengikuti Monitoring dan Evaluasi (Monev) Rencana Kerja Tahunan Reformasi Birokrasi (RKT-RB) Triwulan IV B12 yang digelar secara daring pada Senin, 17 November 2025.

Kegiatan ini diikuti dari Ruang Rapat Bagian Tata Usaha dan Umum oleh Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Rustam Sakka, bersama jajaran terkait.

Dalam monev tersebut, masing-masing satuan kerja menyampaikan perkembangan pelaksanaan RKT-RB serta pemenuhan data dukung indikator B12. Kanwil Kemenkum Kalsel menyampaikan progres positif, khususnya dalam kelengkapan pelaporan dan pemenuhan dokumen pendukung.

“Seluruh data dukung RKT-RB Triwulan IV B12 telah kami penuhi. Ini merupakan bentuk komitmen Kanwil Kemenkum Kalsel dalam menjaga akuntabilitas dan kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa konsistensi pemenuhan data dukung merupakan bagian penting dalam memastikan monitoring, evaluasi, dan pelaksanaan RB dapat berjalan efektif dan terukur. Melalui monev ini, Kanwil Kemenkum Kalsel terus memperkuat komitmen terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang profesional, transparan, dan berintegritas.



17 November 2025

Dorong Tata Kelola Inovatif, Raperda Balangan Masuki Tahap Harmonisasi di Kemenkum Kalsel



Banjarmasin, Humas_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan menggelar Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang Penerapan dan Penyelenggaraan Inovasi Daerah, Senin (17/11/2025). Rapat yang diselenggarakan di Balai Pertemuan Garuda ini merupakan tindak lanjut permohonan harmonisasi yang diajukan Pemerintah Kabupaten Balangan melalui Surat Pj. Sekretaris Daerah Balangan Nomor 180/175/KUM/2025 tanggal 4 November 2025.

Rapat dipimpin oleh Bahjatul Mardhiah, Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya pada Kantor Wilayah, yang memfokuskan pembahasan pada substansi pengaturan inovasi daerah sebagai upaya memperkuat tata kelola dan peningkatan pelayanan publik. Hal ini sesuai mandat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 serta Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah.

Dari Pemerintah Kabupaten Balangan, hadir Akhmad Fauzi, Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, mewakili Pimpinan Daerah, beserta perwakilan perangkat daerah meliputi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, serta Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan.

Pada kesempatan ini Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Alex Cosmas Pinem, melalui Bahjatul Mardhiah selaku Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya menegaskan pentingnya kualitas perancangan regulasi agar memiliki dampak nyata bagi masyarakat.

“Harmonisasi bukan sekadar proses administratif, tetapi upaya memastikan setiap norma yang dirumuskan benar-benar efektif, aplikatif, dan selaras dengan kerangka hukum nasional. Raperda tentang Inovasi Daerah ini harus mampu menjadi motor penggerak kreativitas dan pelayanan publik yang lebih adaptif di Kabupaten Balangan,” ucapnya.

Dalam pembahasannya, Bahjatul Mardhiah menekankan pentingnya harmonisasi sebagai tahap krusial agar Raperda memiliki keselarasan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sekaligus menjaga kualitas perumusan norma. Ia juga mengapresiasi kesiapan Pemerintah Kabupaten Balangan dalam menyampaikan rancangan beserta naskah penjelasnya secara lengkap.

Rancangan Peraturan Daerah ini mengatur secara komprehensif mekanisme inovasi daerah - mulai dari kriteria, pengusulan, uji coba, penerapan, hingga pemberian penghargaan - serta menegaskan peran Pemerintah Daerah dalam mendorong kreativitas, meningkatkan efektivitas pelayanan publik, dan memperkuat daya saing daerah.

Seluruh masukan harmonisasi yang disampaikan dalam rapat akan dituangkan dalam berita acara sebagai dasar penyempurnaan substansi sebelum Ranperda melanjutkan proses fasilitasi dan pembahasan ke tahap berikutnya.

Dengan terlaksananya rapat harmonisasi ini, diharapkan Ranperda tentang Penerapan dan Penyelenggaraan Inovasi Daerah dapat menjadi instrumen hukum yang kuat dan implementatif guna mendorong inovasi berkelanjutan di Kabupaten Balangan.



17 November 2025

Memperkuat Sistem Legislasi Daerah: Evaluasi Ranperda Balangan Digelar Kemenkum Kalsel



Banjarmasin, Humas_Info – Beriringan dengan pelaksanaan Rapat Harmonisasi Raperda Kabupaten Balangan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan turut menggelar Rapat Pemantauan dan Evaluasi Rancangan Produk Hukum Daerah (Ranperda) bersama Pemerintah Kabupaten Balangan, Senin (17/11/2025). Kegiatan ini menjadi ruang koordinasi penting untuk memastikan efektivitas pembentukan produk hukum daerah sekaligus penguatan pembinaan jabatan fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan.

Rapat dipimpin oleh Bahjatul Mardhiah, Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya, dan dihadiri oleh unsur Pemerintah Kabupaten Balangan yang terdiri dari Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, Asisten Pemerintahan dan Kesra, Bapperida Kabupaten Balangan, serta Bagian Hukum Sekretariat Daerah.

Dalam sesi pemantauan dan evaluasi, Bahjatul Mardhiah menekankan bahwa keberhasilan pembentukan Perda tidak hanya ditentukan oleh kualitas penyusunan naskah, tetapi juga oleh proses perencanaan yang sistematis melalui Program Legislasi Daerah (Prolegda). Ia menegaskan bahwa perencanaan pembentukan Perda harus berbasis kebutuhan daerah, selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta dikawal secara teknis oleh perancang yang memiliki kompetensi.

“Perancang bukan hanya penyusun naskah, tetapi mitra strategis pemerintah daerah dalam memastikan setiap regulasi memiliki arah yang jelas, dapat dilaksanakan, dan mendukung agenda pembangunan daerah. Karena itu, pembinaan profesi perancang perlu terus diperkuat agar kualitas produk hukum daerah semakin meningkat,” ujarnya.

Pembahasan juga menyoroti pentingnya keterlibatan perancang sejak tahap awal, yaitu mulai dari identifikasi kebutuhan hukum, penyusunan naskah akademik, sampai penetapan prioritas dalam Prolegda DPRD. Melalui pola ini, pemerintah daerah dapat memastikan bahwa setiap rancangan peraturan daerah memiliki analisis yang memadai, landasan hukum yang kuat, serta perumusan norma yang presisi.

Selain itu, evaluasi dilakukan terhadap pelaksanaan pembentukan Perda di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan selama tahun berjalan, termasuk kendala yang dihadapi perangkat daerah. Kegiatan pemantauan dan evaluasi ini menjadi momentum konsolidasi antara Kementerian Hukum RI melalui Kantor Wilayah dan Pemerintah Kabupaten Balangan untuk memperbaiki tata kelola pembentukan perda. Dengan harmonisasi yang baik dan perencanaan Prolegda yang matang, diharapkan produk hukum daerah yang dihasilkan lebih berkualitas, implementatif, serta mendukung percepatan pembangunan di Kabupaten Balangan.

17 November 2025

Dorong Ekonomi Kerakyatan, Kemenkum Kalsel Fasilitasi Pendaftaran Merek Kolektif Koperasi Merah Putih



Banjarmasin, KI_Info - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan melalui Tim Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual berhasil menyelesaikan proses pengajuan pendaftaran empat Merek Kolektif milik Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KKMP) Kota Banjarmasin pada Senin, (17/11/2025) di Ruang Tim Pelayanan Kekayaan Intelektual. Langkah ini menjadi momentum penting dalam upaya memperkuat identitas, kualitas produk, serta branding koperasi berbasis komunitas di Kalimantan Selatan.

Empat gerai KKMP yang menjadi model percontohan awal pendaftaran merek kolektif tersebut meliputi KKMP Basirih, KKMP Telawang, KKMP Kuin Cerucuk, dan KKMP Kelayan Timur. Proses ini merupakan tindak lanjut dari kegiatan pendampingan teknis yang sebelumnya dilakukan pada Kamis, 31 Oktober 2025 di Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin, yang menghadirkan perwakilan pengurus KKMP dengan gerai aktif di bidang penjualan sembako, LPG, dan ATK.

Selain itu, Tim Pelayanan KI juga turut memberikan pendampingan dalam Kegiatan Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang diselenggarakan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin pada Senin, 03 November 2025 di Hotel Banjarmasin International. Pada kegiatan tersebut, tim memberikan penjelasan teknis mengenai prosedur pendaftaran merek kolektif, manfaat perlindungan kekayaan intelektual, serta memandu peserta dalam memahami setiap tahapan pengajuan pendaftaran.

Proses pendaftaran semakin matang setelah KKMP Basirih melakukan koordinasi dan penandatanganan formulir pendaftaran merek kolektif di Kantor Wilayah pada Rabu, 05 November 2025. Penandatanganan ini menjadi penanda bahwa seluruh persyaratan administratif telah terpenuhi dan dokumen siap diproses ke tingkat pusat.

Melalui rangkaian kegiatan ini, Kanwil Kemenkum Kalsel menunjukkan komitmen nyata dalam mendukung pemberdayaan koperasi dan penguatan ekonomi kreatif daerah melalui perlindungan kekayaan intelektual. Diharapkan model percontohan ini dapat mendorong percepatan pendaftaran Merek Kolektif Koperasi Merah Putih di seluruh wilayah Kalimantan Selatan serta menjadi contoh kolaborasi strategis antarinstansi dalam meningkatkan daya saing produk lokal.

17 November 2025

Sinergi Akademik dan Pemerintah: Kanwil Kemenkum Kalsel Terima Audiensi Universitas Achmad Yani Banjarmasin



Banjarmasin, Humas_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan menerima kunjungan audiensi dan sosialisasi dari Universitas Achmad Yani Banjarmasin pada Senin, (17/11). Kegiatan yang berlangsung di Balai Pertemuan BerAKHLAK Kanwil Kemenkum Kalsel dan dihadiri oleh jajaran pimpinan Kanwil serta perwakilan Universitas Achmad Yani.

Audiensi ini dilaksanakan dalam rangka memperkuat kerja sama dalam pengembangan program pendidikan, penelitian, serta pengabdian masyarakat di bidang hukum, sekaligus membuka ruang kolaborasi strategis antara dunia akademik dan instansi pemerintah.

Pertemuan dihadiri langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kalsel, Alex Cosmas Pinem bersama Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Anton Edward Wardhana didampingi Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Kepala Bidang Pelayanan AHU, dan Kepala Bidang Kekayaan Intelektual. Dari Universitas Achmad Yani turut hadir Rektor Universitas Achmad Yani, Prof. Dr. Ir. Hastirullah Fitrah, MP, serta jajaran akademisi, yaitu Dr. Humayni, S.H., M.H., Dr. Habib Hasym bin Yahya, S.H., M.H., S.Pd., M.Pd., dan Dhieno Yudhistira, S.H., M.H.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kalsel menyampaikan sejumlah poin penting, termasuk tugas dan fungsi Kanwil Kementerian Hukum dalam mendukung pembangunan hukum di daerah. Ia juga menekankan perlunya mendorong penguatan pendidikan kenotariatan di Kalimantan Selatan, agar kebutuhan notaris di daerah dapat tercukupi secara berkelanjutan.



Selain itu, Kakanwil turut membahas penyelenggaraan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) serta pentingnya sosialisasi KUHP terbaru kepada masyarakat, termasuk melalui peran perguruan tinggi. Tak lupa, Kakanwil juga mendorong peningkatan pendaftaran Hak Cipta dan Paten di lingkungan akademik untuk melindungi karya ilmiah dan inovasi yang dihasilkan sivitas Universitas Achmad Yani.

Pertemuan berlangsung hangat dan penuh diskusi konstruktif. Kedua pihak sepakat melanjutkan koordinasi untuk membuka peluang kolaborasi yang lebih luas ke depan, khususnya dalam penguatan kapasitas akademik dan penegakan hukum di Kalimantan Selatan.



17 November 2025

Kemenkum Kalsel Kembali Ikuti Webinar OKE KI : Bahas Kepemilikan Karya Berbasis Kecerdasan Buatan



Banjarmasin, Humas_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan melalui Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, Riswandi, beserta jajaran mengikuti Webinar OKE KI Seri #37 bertema “Karya Berbasis Kecerdasan Buatan, Milik Siapa?” pada Senin, 17 November 2025. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) secara daring.

Webinar yang diikuti oleh pegawai layanan kekayaan intelektual dari seluruh Indonesia ini membahas isu aktual mengenai kepemilikan karya yang dihasilkan melalui teknologi kecerdasan buatan (AI) dan dampaknya terhadap sistem hak cipta nasional.

Kegiatan menghadirkan dua narasumber, yaitu Achmad Iqbal Taufiq, Analis Hukum Ahli Muda DJKI, serta Ari Juliano, praktisi hukum dari Assegaf Hamzah & Partners. Keduanya memaparkan isu fundamental terkait pencipta dalam karya AI, ruang lingkup perlindungan hak cipta, hingga tantangan penetapan subjek hukum pemegang hak ketika karya dihasilkan sepenuhnya atau sebagian oleh mesin.

Selain membahas regulasi nasional, narasumber juga menyoroti perkembangan kebijakan internasional terkait karya berbasis AI dan urgensi harmonisasi aturan untuk memberikan kepastian hukum bagi pelaku industri kreatif yang memanfaatkan teknologi tersebut.

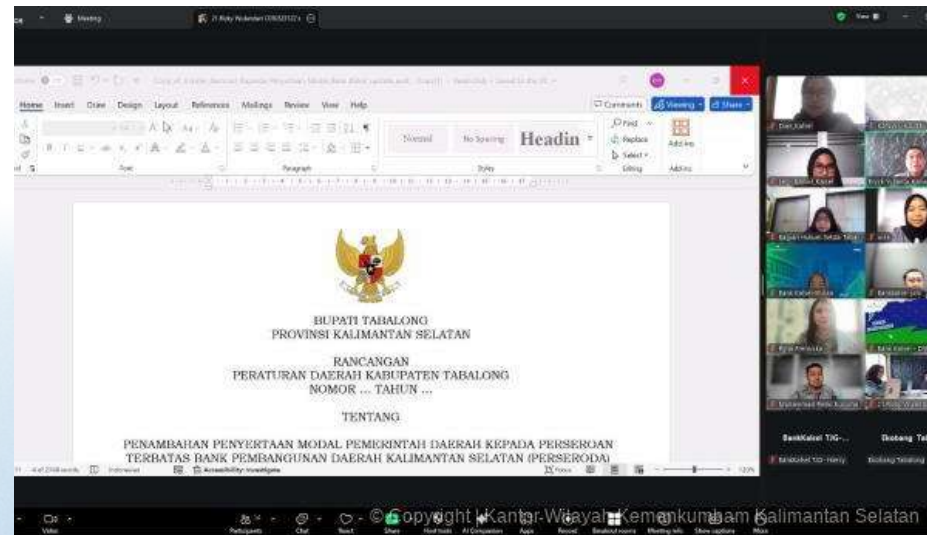
Kegiatan berlangsung interaktif melalui sesi tanya jawab yang melibatkan peserta dari berbagai kantor wilayah, termasuk jajaran Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Kemenkum Kalsel.

Dengan keikutsertaan dalam webinar ini, Kemenkum Kalsel berharap semakin memperkuat kapasitas teknis jajaran layanan KI dalam menghadapi dinamika perkembangan teknologi yang terus memengaruhi sistem perlindungan kekayaan intelektual.



18 November 2025

Dorong Pertumbuhan Ekonomi, Ranperda Penyertaan Modal Bank Kalsel Dikaji Bersama Kanwil Kalsel



Banjarmasin, Humas_Info - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan melalui Tim Perancang Peraturan Perundang-undangan melaksanakan rapat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kabupaten Tabalong tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan (Perseroda). Kegiatan berlangsung secara virtual menggunakan aplikasi Zoom Meeting pada Selasa (18/11) dan dipimpin oleh Eryck Yulianto, Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya Kanwil Kemenkum Kalsel.

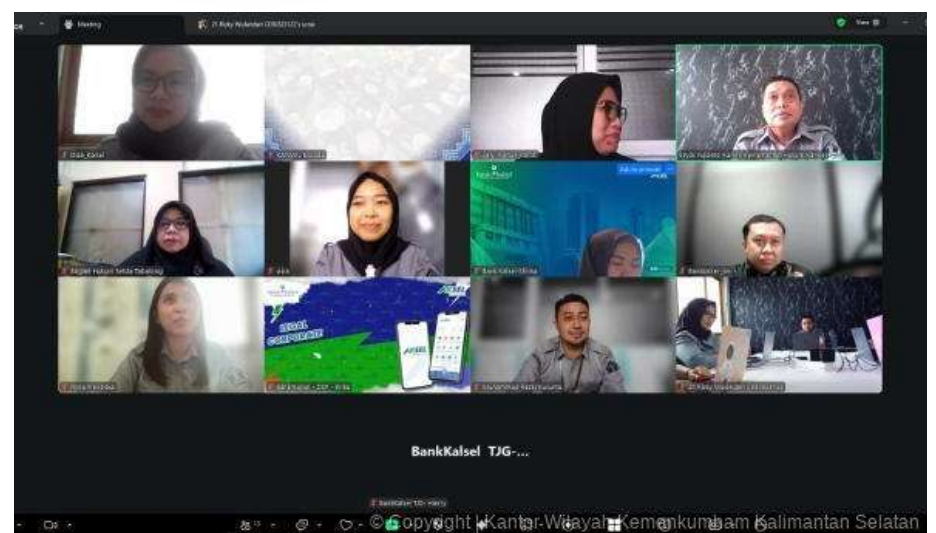
Rapat turut dihadiri Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tabalong, Husin Ansari, yang menegaskan bahwa Ranperda ini sangat penting sebagai langkah memperkuat struktur permodalan Bank Kalsel sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tabalong.

“Penyertaan modal ini bukan hanya kewajiban regulatif, tetapi strategi pembangunan daerah untuk meningkatkan perekonomian dan memperkuat sektor perbankan daerah,” ujar Husin Ansari.

Kegiatan juga dihadiri oleh Kepala Bagian Hukum Setda Tabalong, Norma Zahriati, perwakilan Bank Kalsel, serta Tim Perancang Kanwil Kemenkum Kalsel. Diskusi berjalan konstruktif dengan fokus pada penyempurnaan substansi Ranperda, termasuk kesesuaian dasar hukum penyertaan modal, rincian nilai penyertaan, serta mekanisme pengawasan oleh pemerintah daerah.

Tim Perancang Kanwil Kemenkum Kalsel memberikan masukan penting, di antaranya penegasan bentuk penambahan penyertaan modal, mekanisme penganggaran dalam APBD, serta kejelasan regulasi terkait kewenangan pejabat yang mewakili pemerintah daerah dalam RUPS Bank Kalsel.

Pembahasan diakhiri dengan kesimpulan untuk melanjutkan proses harmonisasi dan finalisasi draft Ranperda, sehingga dapat segera diajukan pada tahapan pembahasan selanjutnya antara Pemerintah Kabupaten Tabalong dan DPRD. Kegiatan ini menjadi wujud dukungan Kanwil Kemenkum Kalsel dalam memastikan setiap produk hukum daerah tersusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta berdampak nyata bagi pembangunan ekonomi daerah.



18 November 2025

Penutupan Latsar CPNS 2025: Kanwil Kemenkum Kalsel Tegaskan Komitmen Penguatan SDM



Banjarmasin, Humas_Info - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan mengikuti secara daring kegiatan Penutupan Pelatihan Dasar (Latsar) Calon Pegawai Negeri Sipil Angkatan XI sampai dengan XV Tahun Anggaran 2025 yang diselenggarakan oleh Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum Jawa Tengah bekerja sama dengan BPSDM Hukum Kementerian Hukum RI pada Selasa (18/11/25). Kegiatan ini diikuti oleh Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Rustam Sakka, Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, Riswandi, Analis SDM Aparatur Ahli Madya, Eko Herdianto, serta para CPNS Kanwil Kemenkum Kalsel yang mengikuti jalannya acara secara daring dari Ruang Rapat Teleconference.

Rangkaian acara diawali dengan penyampaian laporan pelaksanaan Latsar oleh Kepala Balai Diklat Hukum Jawa Tengah, Rinto Gunawan Sitorus. Dalam laporannya, ia memaparkan hasil evaluasi penyelenggaraan pelatihan yang menunjukkan capaian sangat memuaskan, yaitu 94,94 persen untuk evaluasi penyelenggaraan dan 96,63 persen untuk evaluasi tenaga pelatihan.

Rinto Gunawan Sitorus juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta, tenaga pelatihan, serta fasilitator atas dedikasi, kedisiplinan, dan komitmen dalam memastikan proses pembelajaran berjalan efektif. Ia turut menggarisbawahi beberapa masukan dari peserta, terutama terkait perlunya peningkatan koordinasi dan kesempatan pembelajaran klasikal pada beberapa tahapan pelatihan yang dinilai lebih optimal jika dilakukan secara tatap muka.

Penutupan kegiatan kemudian dilanjutkan dengan arahan dari Kepala Pusat Pengembangan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan, Mutia Farida, yang hadir mewakili Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum Kemenkum, Gusti Ayu Putu Suwardani. Dalam arahannya, Mutia Farida menekankan bahwa Latsar CPNS bukan sekadar syarat administratif bagi perubahan status kepegawaian, namun merupakan investasi jangka panjang dalam menyiapkan sumber daya aparatur yang memiliki integritas moral, kompetensi teknis, serta karakter sebagai pelayan publik. Ia mengingatkan bahwa integritas harus menjadi fondasi utama bagi seluruh CPNS, termasuk komitmen menjauhi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Mutia Farida juga menekankan pentingnya penerapan nilai BerAKHLAK dalam perilaku kerja sehari-hari, penguatan kolaborasi lintas unit dan lintas generasi, serta kemampuan untuk beradaptasi dan berinovasi di tengah perkembangan teknologi dan dinamika organisasi. Para CPNS diharapkan dapat menjadi agen perubahan yang membawa energi positif, ide-ide segar, serta semangat pembaharuan di unit kerja masing-masing. Pada akhir arahannya, Mutia Farida secara resmi menutup kegiatan dengan ucapan syukur dan harapan agar seluruh peserta mampu mengemban amanah sebagai ASN yang membanggakan organisasi dan negara.

Secara terpisah, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Alex Cosmas Pinem, memberikan apresiasi kepada CPNS Kanwil Kemenkum Kalsel yang telah menyelesaikan seluruh rangkaian Latsar dengan baik. Dalam pernyataannya, beliau menyampaikan,

“Saya menyampaikan apresiasi dan selamat kepada seluruh CPNS yang telah menyelesaikan Latsar dengan baik. Pembelajaran yang kalian ikuti bukan hanya untuk memenuhi kewajiban, tetapi menjadi fondasi karakter, integritas, dan profesionalisme sebagai aparatur Kementerian Hukum. Saya berharap para CPNS Kanwil Kemenkum Kalsel membawa semangat baru, bekerja dengan nilai BerAKHLAK, dan menjadi bagian dari birokrasi yang semakin adaptif dan melayani. Ia menegaskan bahwa Kanwil Kemenkum Kalsel berkomitmen untuk terus memperkuat pembinaan pegawai dan memastikan seluruh CPNS dapat menerapkan kompetensi yang diperoleh selama pelatihan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari demi meningkatkan kualitas layanan di lingkungan Kemenkum.

Pada penutupan kegiatan ini, salah satu peserta Latsar asal lingkungan Kanwil Kemenkum Kalsel, yaitu Luthfi Irsyadurrafi dari Angkatan XIV dinyatakan berhasil meraih predikat peserta terbaik kedua dengan nilai akhir 92.57 dengan mengangkat judul aktualisasi Optimalisasi Pengelolaan Agenda Kerja Organisasi Melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan.



18 November 2025

Kemenkum Kalsel Berbangga, Luthfi Irsyadurrafi Jadi Peserta Terbaik Kedua Latsar CPNS 2025



Banjarmasin, Humas_Info - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan kembali menorehkan prestasi membanggakan melalui salah satu Calon Pegawai Negeri Sipilnya, Luthfi Irsyadurrafi, yang berhasil meraih predikat peserta terbaik kedua pada Pelatihan Dasar (Latsar) Calon Pegawai Negeri Sipil Angkatan XIV Tahun Anggaran 2025 yang diselenggarakan oleh Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum Jawa Tengah bekerja sama dengan BPSDM Hukum Kementerian Hukum RI, Selasa (18/11/25).

Prestasi ini diraih setelah Luthfi menunjukkan kinerja unggul dalam seluruh rangkaian pelatihan, baik pada tahap pembelajaran, penilaian kompetensi, maupun penyusunan aktualisasi. Karya aktualisasi yang diusungnya berjudul “Optimalisasi Pengelolaan Agenda Kerja Organisasi Melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan”, dinilai memberikan kontribusi nyata terhadap efektivitas manajemen agenda kerja dan memiliki potensi implementatif yang kuat di lingkungan Kanwil. Gagasan tersebut diapresiasi sebagai inovasi yang relevan dengan kebutuhan organisasi, selaras dengan semangat digitalisasi dan peningkatan kualitas layanan publik.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Alex Cosmas Pinem, menyampaikan apresiasi dan kebanggaannya atas capaian tersebut. “Prestasi yang diraih Luthfi merupakan bukti bahwa CPNS Kanwil Kemenkum Kalsel memiliki kualitas, potensi, dan komitmen untuk memberikan yang terbaik bagi organisasi. Aktualisasi yang dibuatnya mencerminkan pemikiran inovatif sekaligus kemampuan membaca kebutuhan organisasi secara tepat. Kami berharap prestasi ini menjadi inspirasi bagi seluruh pegawai untuk terus berkembang dan menghadirkan solusi yang berdampak,” ujarnya dalam pernyataan terpisah.

Prestasi ini menambah daftar capaian positif Kanwil Kemenkum Kalsel dalam pengembangan sumber daya manusia, sekaligus memperkuat optimisme bahwa generasi ASN muda di lingkungan Kemenkum mampu menjadi agen perubahan yang membawa energi baru, adaptif, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik. Capaian Luthfi Irsyadurrafi ini diharapkan menjadi motivasi bagi peserta Latsar lainnya untuk terus belajar, berinovasi, dan memberikan kontribusi terbaik bagi instansi dan masyarakat.

18 November 2025

Kemenkum Kalsel Laksanakan Audit PMPJ pada Notaris di Kabupaten Tapin



Tapin, AHU_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan melalui Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum (AHU) melaksanakan Audit Pengawasan Kepatuhan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) terhadap notaris di Kabupaten Tapin, Selasa (18/11/2025).

Audit dipimpin oleh Kepala Bidang Pelayanan AHU, Dewi Woro Lestari, bersama jajaran Bidang Pelayanan AHU. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari analisis kuesioner PMPJ yang sebelumnya telah diisi oleh seluruh notaris di wilayah Kalimantan Selatan. Dari hasil analisis tersebut, ditetapkan empat notaris berkategori risiko sangat tinggi sebagai objek pemeriksaan.

Pelaksanaan audit diawali dengan pemaparan maksud dan tujuan kegiatan, termasuk penegasan pentingnya penerapan PMPJ sebagai instrumen pencegahan terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT) dalam layanan kenotariatan. Tim juga memberikan penjelasan mengenai langkah identifikasi, verifikasi, serta kewajiban pelaporan yang harus dipenuhi notaris sebagai pihak pelapor. Dewi Woro Lestari menegaskan bahwa kegiatan audit ini tidak hanya untuk memastikan kepatuhan, tetapi juga memberikan early warning serta penguatan pemahaman kepada notaris mengenai penerapan prinsip kehati-hatian.

“Melalui audit ini, kami berharap para notaris semakin memahami urgensi penerapan PMPJ, meningkatkan kewaspadaan, dan terus patuh terhadap ketentuan dalam pencegahan TPPU dan TPPT. Peran notaris sangat strategis dalam menjaga integritas layanan publik,” ujarnya.

Kegiatan berjalan lancar dengan komunikasi dua arah antara auditor dan notaris, termasuk pembahasan temuan sementara serta langkah perbaikan yang perlu dilakukan.

Kantor Wilayah Kemenkum Kalsel akan menindaklanjuti hasil audit ini sebagai bagian dari penguatan pengawasan dan peningkatan kepatuhan notaris di wilayah Kalimantan Selatan.



19 November 2025

Penguatan Integritas Pegawai: Kemenkum Kalsel Gelar Penguatan Budaya Anti Korupsi dan Pencegahan Pungli-Gratifikasi



Banjarmasin, Humas_Info - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan melaksanakan kegiatan Penguatan Pembangunan Budaya Anti Korupsi serta Unit Pemberantasan Pungutan Liar (Pungli) dan Gratifikasi (UPP/UPG) bertempat di Balai Pertemuan Garuda Kanwil Kemenkum Kalsel, Rabu (19/11/25). Kegiatan ini dihadiri oleh seluruh jajaran pegawai, mulai dari pejabat manajerial, non-manajerial, PPNPN, CPNS, hingga mahasiswa/i magang, dengan menghadirkan narasumber Saul Pabendon, Auditor Ahli Muda dari BPKP Perwakilan Kalimantan Selatan, serta Khalid Sardi Hatapayo, Kasi I Ideologi, Politik, Pertahanan, dan Keamanan pada Bidang Intelijen Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan.

Dalam sambutan Kepala Kantor Wilayah, Alex Cosmas Pinem yang dibacakan oleh Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Rustam Sakka, disampaikan bahwa penguatan budaya anti korupsi merupakan komitmen nyata Kanwil Kemenkum Kalsel untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Ia menegaskan bahwa penguatan budaya anti korupsi adalah komitmen nyata untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berintegritas, serta mengingatkan bahwa korupsi merusak kepercayaan publik dan merugikan negara sehingga harus diberantas melalui keteladanan pegawai.

“Integritas wajib diwujudkan dalam tindakan sehari-hari, termasuk menolak gratifikasi dan menjaga kejujuran serta perlunya memperkuat pengawasan internal melalui mekanisme pelaporan yang transparan dan budaya saling mengingatkan,” ucap Rustam.

Ia juga turut menyoroti peran strategis UPP/UPG yang berperan penting dalam edukasi dan pencegahan pelanggaran, bukan hanya penindakan, sembari menegaskan bahwa komitmen menuju WBK/WBBM harus tercermin dalam pelayanan publik yang profesional dan transparan.

Selain itu, selaku Kepala Bagian TU dan Umum Rustam Sakka mengingatkan bahwa pencegahan penyimpangan lebih diutamakan dibanding penindakan.

“Pelanggaran kecil tidak boleh dianggap wajar,” ujarnya, sembari menekankan pentingnya membangun lingkungan kerja yang profesional, bebas pungli, dan terpercaya. Di akhir sambutan, ia mengajak seluruh jajaran untuk memperkuat integritas dan inovasi demi layanan publik yang semakin baik.

Setelah sambutan pembukaan, kegiatan dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh narasumber dari BPKP dan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan, kemudian sesi diskusi interaktif yang membuka ruang bagi peserta untuk bertanya, berdialog, dan memperdalam pemahaman mengenai upaya pencegahan korupsi, pengendalian gratifikasi, serta pemberantasan pungutan liar.

Secara keseluruhan, kegiatan berlangsung dengan baik dan lancar serta mendapatkan respons positif dari peserta. Kegiatan ini diharapkan menjadi momentum penting dalam memperkuat budaya kerja yang bersih, profesional, dan berintegritas, sekaligus mempertegas komitmen Kanwil Kemenkum Kalsel dalam membangun pelayanan publik yang berkualitas, terpercaya, dan bebas dari penyimpangan.



19 November 2025

Momentum Hari Bakti Kemenimipias Ke-1, Kanwil Kemenkum Kalsel Perkuat Sinergi Imigrasi dan Pemasyarakatan



Banjarmasin, Humas_Info — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan turut berpartisipasi dalam kegiatan Tasyakuran Peringatan Hari Bakti Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipias) Ke-1 Tahun 2025, yang digelar di Lapas Kelas IIA Banjarmasin, Rabu (19/11/2025). Dalam kesempatan ini, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Rustam Sakka, hadir mewakili Kantor Wilayah.

Kegiatan yang mengusung tema “Satu Langkah, Satu Semangat, Satu Pengabdian untuk Bangsa” tersebut merupakan puncak peringatan hari lahir Kemenimipias. Acara dihadiri oleh berbagai tamu penting, termasuk Bupati Hulu Sungai Utara; Asisten I Setda Kota Banjarmasin mewakili Wali Kota Banjarmasin; serta Asisten III Setda Balangan mewakili Bupati Balangan.

Sejumlah instansi vertikal seperti Ditjen Imigrasi Kalsel, Kanwil Hukum Kalsel, Kanwil HAM, kepolisian, kejaksaan, TNI, pengadilan, serta para Kepala UPT Pemasyarakatan dan Imigrasi se-Banjar Raya turut serta memeriahkan acara. Hadir pula mitra kerja, lembaga, dan perwakilan perusahaan.

Rangkaian kegiatan diawali dengan penampilan musik panting oleh warga binaan, persembahan biola oleh petugas Lapas Banjarmasin, serta penampilan modern dance dari warga binaan LPP Martapura. Pertunjukan ini menjadi bukti nyata keberhasilan pembinaan kepribadian dan pengembangan kreativitas warga binaan.

Salah satu agenda penting acara adalah penandatanganan Berita Acara Serah Terima Hibah Tanah antara Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Kantor Wilayah Ditjen Pemasyarakatan Kalimantan Selatan. Setelah itu, dilanjutkan dengan pemberian penghargaan kepada mitra kerja yang telah berperan besar dalam mendukung tugas Pemasyarakatan dan Imigrasi di wilayah Kalimantan Selatan.

Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pemasyarakatan Kalimantan Selatan, Mulyadi, kemudian menyampaikan sambutan dan membacakan Amanat Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Dalam amanat tersebut ditegaskan pentingnya menjaga integritas, meningkatkan kualitas layanan, dan memperkuat sinergi dalam menghadapi dinamika tugas yang terus berkembang. Mulyadi menambahkan bahwa peringatan Hari Bakti Ke-1 menjadi momentum memperkuat komitmen seluruh jajaran dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

Acara dilanjutkan dengan ceramah agama oleh Ustadz Ilham Humaidi yang menyampaikan pesan tentang syukur, amanah, dan pengabdian sebagai abdi negara, memberikan nuansa spiritual yang memperdalam makna tasyakuran.

Sebagai penutup rangkaian acara, dilakukan pemotongan tumpeng sebagai simbol rasa syukur atas perjalanan satu tahun Kemenimipias. Momen ini menggambarkan tekad bersama untuk memperkuat kolaborasi, meningkatkan kualitas pembinaan, dan memberikan layanan yang semakin bermanfaat bagi masyarakat. Acara kemudian ditutup dengan sesi foto bersama dan ramah tamah yang berlangsung hangat dan penuh kebersamaan.

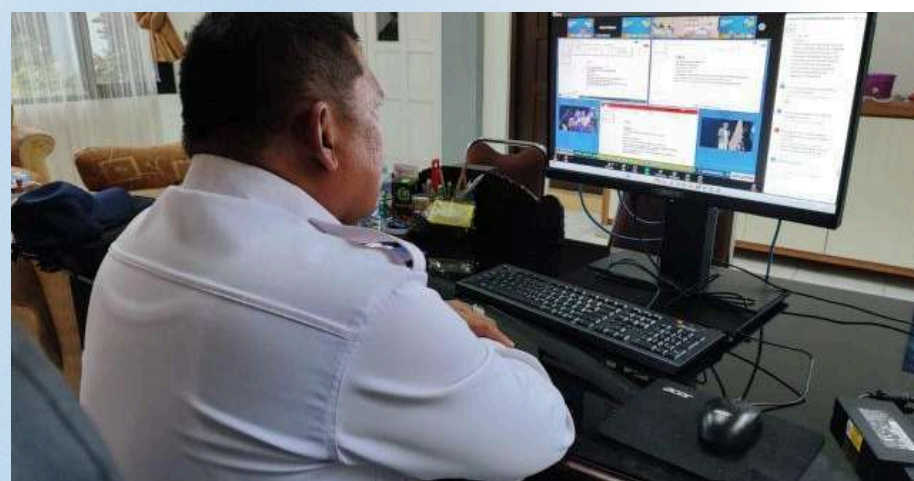


19 November 2025

Kemenkum Kalsel Ikuti Webinar “What’s Up Kemenkum – Campus Calls Out”



Banjarmasin, Humas_Info - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan turut serta mengikuti kegiatan “What’s Up Kemenkum – Campus Calls Out” yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dalam rangka meningkatkan aksesibilitas dan fleksibilitas penyampaian informasi kepada publik, khususnya bagi generasi kampus dan masyarakat akademik. Kegiatan ini dilaksanakan pada Rabu, 19 November 2025 secara virtual melalui platform Zoom dan diikuti oleh pegawai dari seluruh satuan kerja di lingkungan Kemenkum.



Agenda yang menghadirkan sejumlah tokoh nasional ini menjadi ruang dialog dan edukasi publik mengenai isu-isu strategis di bidang hukum, pemerintahan, dan kebijakan publik. Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, hadir sebagai narasumber utama bersama Guru Besar FH Undip, Paramita Prananingtyas, Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana, serta Sherly Tjoanda sebagai pemimpin daerah yang juga berbagi perspektif mengenai dinamika kebijakan hukum di tingkat regional. Acara ini dipandu oleh host Fristian Griec dengan didampingi co-host Insan Nur Akbar.



Melalui kegiatan ini, jajaran Kanwil Kemenkum Kalsel mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai arah kebijakan Kemenkum dalam memperkuat komunikasi publik, transformasi hukum, serta penguatan budaya kerja berbasis integritas dan kolaborasi. Forum ini juga menegaskan komitmen Kemenkum untuk terus menghadirkan inovasi dalam penyampaian informasi melalui pendekatan yang lebih modern, interaktif, dan mudah dijangkau oleh masyarakat luas.

Partisipasi Kanwil Kemenkum Kalsel dalam kegiatan ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan untuk memperkuat kapasitas komunikasi aparatur, meningkatkan literasi hukum masyarakat, sekaligus mendukung agenda Kemenkum dalam membangun pemerintahan yang informatif, terbuka, dan responsif terhadap perkembangan zaman.



20 November 2025

Kemenkum Kalsel Dukung Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan



Banjarmasin, Humas_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan melaksanakan kegiatan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan se-Kalimantan Selatan yang digelar secara hybrid di Ruang Rapat Kepala Kantor Wilayah dan melalui Zoom Meeting, Rabu (19/11/2025). Pemanfaatan teknologi informasi menjadi fokus penting dalam kegiatan ini, terutama melalui penggunaan aplikasi e-Perancang sebagai instrumen penyusunan kebutuhan formasi secara digital.

Kegiatan dibuka oleh Bahjatul Mardhiah, selaku Ketua Tim Kerja Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah, dan turut dihadiri Kasubdit Bina Perancang Peraturan Perundang-undangan Ditjen PP, Siti Masitah, beserta jajaran. Peserta kegiatan meliputi perancang peraturan perundang-undangan dan analis hukum Kanwil Kemenkum Kalsel, Biro Hukum Provinsi, Bagian Hukum Kabupaten/Kota, serta Sekretariat DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan.

Pemanfaatan teknologi informasi menjadinsalah satu perhatian utama. Siti Masitah memaparkan bagaimana aplikasi e-Perancang digunakan untuk menghitung kebutuhan formasi jabatan secara lebih akurat, terstruktur, dan terdokumentasi. Sistem ini memungkinkan setiap instansi pemerintah melakukan penyusunan kebutuhan jabatan, mengajukan usulan formasi, hingga proses penetapan secara elektronik, sehingga mengurangi potensi kesalahan manual dan mempercepat alur birokrasi.

Peserta kemudian mengikuti uji coba pengisian formasi secara langsung di aplikasi e-Perancang. Melalui simulasi ini, para perancang dan pejabat hukum daerah mendapatkan pengalaman praktis dalam memanfaatkan platform digital untuk penyusunan kebutuhan formasi, sekaligus memahami fitur-fitur yang mendukung efisiensi dan konsistensi data.

Ketua Tim Kerja Pembinaan Jabatan Fungsional Perancang di Daerah, Eryck Yulianto, menegaskan bahwa pemanfaatan TI menjadi kunci dalam meningkatkan tata kelola jabatan fungsional perancang.



“Penguatan kompetensi harus dibarengi dengan kemampuan memanfaatkan sistem elektronik. Aplikasi e-Perancang membantu memastikan pengusulan formasi didasarkan pada data yang terstandar, transparan, dan mudah ditelusuri,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa pembinaan dan pendampingan akan terus dilakukan untuk memastikan kelancaran penggunaan aplikasi di seluruh daerah.

Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas perancang peraturan perundang-undangan sekaligus mendukung optimalisasi kebutuhan formasi jabatan fungsional melalui pemanfaatan teknologi informasi yang lebih efektif dan terintegrasi.



20 November 2025

Kanwil Kemenkum Kalsel Gelar Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan se-Kalimantan Selatan



Banjarmasin, Humas_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan menyelenggarakan kegiatan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan yang dilaksanakan pada Rabu (19/11), bertempat di Ruang Rapat Kepala Kantor Wilayah serta diikuti melalui platform Zoom Meeting. Kegiatan ini diikuti para perancang dari seluruh kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan.

Kegiatan dibuka oleh Bahjatul Mardhiah selaku Ketua Tim Kerja Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah, dan dihadiri oleh jajaran Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, termasuk Kasubdit Bina Perancang Peraturan Perundang-undangan, Siti Masitah, yang bertindak sebagai narasumber utama.

Dalam pemaparannya, Siti Masitah menyampaikan materi terkait kerangka peraturan perundang-undangan, yang meliputi teknik perumusan judul regulasi, konsideran atribusi dan delegasi, serta penyusunan batang tubuh peraturan. Ia juga menjelaskan aspek-aspek teknis perumusan delegasi kewenangan dalam penyusunan regulasi daerah.

Sesi diskusi berlangsung interaktif dengan topik bahasan antara lain perbedaan ketentuan peralihan dan ketentuan penutup, teknik pendelegasian peraturan kepala daerah, serta penentuan besaran denda administratif dalam sanksi administratif.

Pada sesi berikutnya, Siti Masitah memberikan materi mengenai pembinaan perancang melalui platform e-Perancang, yang mencakup proses penyusunan kebutuhan formasi jabatan, mekanisme usulan formasi, serta simulasi pengisian formasi perancang secara elektronik. Para peserta turut melakukan uji coba penginputan formasi sebagai bagian dari praktik pembelajaran.

Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua Tim Kerja Pembinaan Jabatan Fungsional Perancang di Daerah, Eryck Yulianto, serta tim kerja perancang dan analis hukum Kanwil Kemenkum Kalsel, bersama peserta dari DPRD, Biro Hukum, dan Bagian Hukum se-Kalimantan Selatan.

Ketua Tim Kerja Pembinaan JF Perancang, Eryck Yulianto, menyampaikan bahwa kegiatan ini penting untuk meningkatkan kapabilitas menyusun regulasi di daerah.

“Melalui pembinaan berkelanjutan dan pemahaman yang terintegrasi, kita memastikan produk hukum daerah tersusun secara berkualitas, harmonis, serta selaras dengan peraturan perundang-undangan nasional,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa Kanwil Kemenkum Kalsel akan terus memberikan pendampingan apabila terdapat kendala dalam penggunaan sistem elektronik maupun penyusunan formasi perancang di daerah.

Dengan terselenggaranya kegiatan ini, diharapkan koordinasi dan kapasitas perancang peraturan di daerah semakin meningkat, sehingga mutu penyusunan produk hukum daerah dapat terus ditingkatkan.



20 November 2025

Kanwil Kemenkum Kalsel Musnahkan 34.100 Arsip Substantif, Tingkatkan Efisiensi dan Tertib Kearsipan



Banjarmasin, Humas_Info — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan melaksanakan kegiatan Pemusnahan Arsip Substantif sebagai langkah strategis untuk memperkuat tata kelola kearsipan dan meningkatkan efektivitas kerja organisasi. Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran Kanwil Kemenkum Kalsel serta para saksi dari Biro Umum, Inspektorat Jenderal, dan Biro Hukum, Komunikasi Publik, dan Kerja Sama yang berhadir secara virtual.

Pada kesempatan tersebut, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Alex Cosmas Pinem, diwakili oleh Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Rustam Sakka, yang membacakan sambutan resmi Kakanwil. Dalam sambutan tersebut disampaikan bahwa arsip adalah rekaman penting seluruh aktivitas organisasi yang akan terus bertambah seiring kompleksitas tugas. Penumpukan arsip tanpa penyusutan yang tepat dapat menghambat efektivitas ruang kerja dan administrasi.

“Pemusnahan arsip merupakan langkah penting untuk menjaga efisiensi dan keamanan informasi, memastikan tidak ada data yang disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak berhak,” ujar Rustam membacakan sambutan Kakanwil.

Arsip yang dimusnahkan terdiri dari berkas pendaftaran Jaminan Sertifikat Fidusia tahun 2004–2013, dengan total 34.100 berkas. Proses pemusnahan dilakukan sesuai Permenkumham Nomor 54 Tahun 2016 tentang Penyusutan Arsip, yang mengatur bahwa arsip yang telah habis masa retensinya dan tidak memiliki nilai guna administratif maupun hukum wajib dilakukan penyusutan.

Melalui kegiatan ini, Kanwil Kemenkum Kalsel menegaskan komitmen dalam meningkatkan mutu pengelolaan arsip secara profesional, tertib, dan sesuai standar kearsipan nasional.



“Kami berharap pemusnahan arsip ini semakin menata pengelolaan arsip di setiap unit kerja, sehingga informasi yang masih bernilai guna dapat didayagunakan secara optimal bagi kepentingan operasional organisasi,” lanjut Rustam.

Turut berhadir pada kegiatan ini Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum, Dewi Woro Lestari yang turut melakukan secara simbolis pemusnahan arsip bersama Kepala Bagian TU dan Umum beserta jajaran. Kegiatan ditutup dengan ajakan agar seluruh jajaran terus memperkuat manajemen kearsipan sebagai bagian dari upaya menghadirkan pelayanan publik yang efisien, akuntabel, dan berkualitas.



20 November 2025

Penguatan Kompetensi, Kemenkum Kalsel Ikuti Edukasi KI Mekanisme Internasional



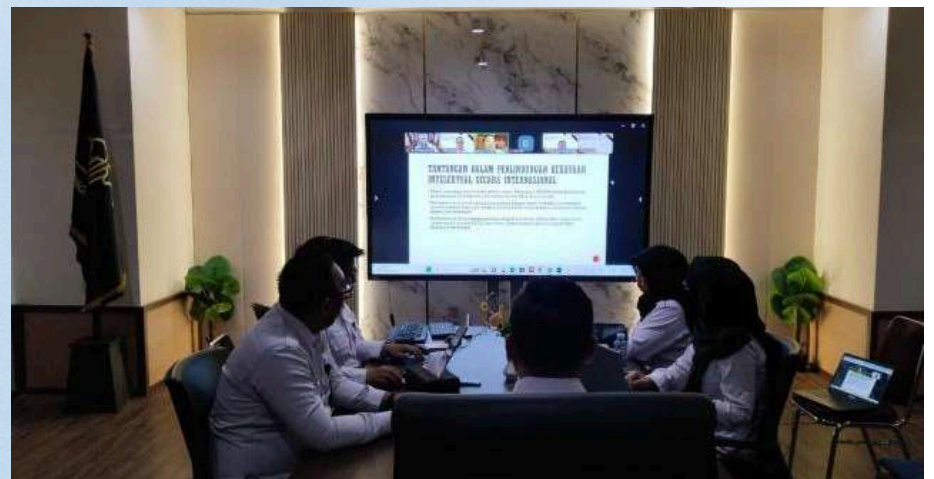
Banjarmasin, KI_Info - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan melalui Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual mengikuti kegiatan Edukasi Kekayaan Intelektual (KI) secara daring dengan fokus pada Modul Permohonan KI dengan Mekanisme Internasional, Rabu (19/11/2025).

Kegiatan yang diikuti di Ruang Ber-Akhlaq Kanwil Kemenkum Kalsel ini diselenggarakan oleh Direktorat Kerja Sama, Pemberdayaan, dan Edukasi, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) sebagai bentuk peningkatan kompetensi teknis bagi para pengelola layanan KI.

Pelaksanaan edukasi ini merupakan tindak lanjut dari Surat Direktur Kerja Sama, Pemberdayaan, dan Edukasi Nomor HKI.5-HH.01.02-494 tertanggal 12 November 2025 tentang Penundaan Kegiatan Edukasi KI secara Daring. Adapun peserta dari Kanwil Kemenkum Kalsel terdiri dari Kepala Bidang Pelayanan KI beserta Tim Layanan KI.

Narasumber utama, Ranggalawe Suryasaladin, S.H., M.H., LL.M., menyampaikan materi komprehensif yang terbagi dalam lima sesi, meliputi tata cara pencatatan ciptaan, pendaftaran paten, pendaftaran merek, pendaftaran desain industri, serta praktik penyusunan dokumen aplikasi dan/atau pendaftaran KI secara internasional. Materi yang disampaikan memberikan pemahaman mendalam mengenai prosedur yang berlaku dalam mekanisme internasional seperti Madrid Protocol dan Patent Cooperation Treaty (PCT).

Melalui kegiatan ini, diharapkan pegawai bidang KI Kanwil Kemenkum Kalsel dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan teknis dalam memfasilitasi masyarakat maupun pelaku usaha yang memerlukan layanan pendaftaran kekayaan intelektual di tingkat global. Edukasi ditutup dengan sesi tanya jawab interaktif sebelum kegiatan resmi diakhiri oleh host.



20 November 2025

Jawa Tengah Wujudkan 100 Persen Posbankum, Negara Hadirkan Akses Keadilan yang Nyata bagi Masyarakat



Semarang - Kementerian Hukum kembali mencatat pencapaian penting dalam perluasan akses keadilan bagi masyarakat. Pada Rabu (19/11/2025), Provinsi Jawa Tengah resmi mencapai 100 persen pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di seluruh desa dan kelurahan, sebanyak 8.563 Posbankum. Capaian ini menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam menghadirkan layanan hukum yang cepat, mudah, dan dekat, selaras dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan bahwa hukum adalah jaminan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam kegiatan yang berlangsung di Gedung Gradhika Bhakti Praja Kompleks Kantor Gubernur Jawa Tengah, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, menyampaikan bahwa Jawa Tengah merupakan provinsi yang kaya tradisi dan budaya, namun sekaligus menghadapi dinamika sosial serta tantangan geografis yang membutuhkan pendekatan layanan hukum yang lebih inklusif.

“Masyarakat tidak hanya membutuhkan kepastian hukum di atas kertas, tetapi akses keadilan yang nyata yang cepat, mudah dan dekat,” tegas Supratman. Ia menekankan bahwa berbagai persoalan di tingkat desa dapat diselesaikan secara damai melalui mekanisme musyawarah dan mufakat, dan kehadiran Posbankum menjadi alat yang efektif untuk mewujudkan hal tersebut.

Menurutnya, Posbankum adalah jawaban konkret negara dalam mewujudkan keadilan substantif. “Bapak Presiden selalu mengingatkan bahwa hukum adalah jaminan keadilan, dan keadilan bukan hanya hak warga negara, tetapi tuntutan moral setiap warga negara. Posbankum adalah wujud nyata dari visi tersebut, menjadi garda terdepan layanan hukum di desa dan kelurahan,” jelasnya.

Capaian Jawa Tengah ini juga mendukung komitmen Indonesia pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) ke-16, terutama target 16.3 mengenai jaminan akses keadilan bagi semua. Dalam Pertemuan Tingkat Tinggi Koalisi Akses Keadilan di Madrid pada 11 November 2025, Indonesia kembali menyampaikan keberhasilan model Posbankum sebagai praktik baik yang efektif dalam memperluas layanan hukum hingga tingkat masyarakat paling bawah.

Jawa Tengah saat ini memiliki 58 Pemberi Bantuan Hukum (PBH) terakreditasi di 27 kabupaten/kota. Dengan terbentuknya 8.563 Posbankum di provinsi ini, jumlah Posbankum secara nasional meningkat menjadi 70.115 atau setara 83,51 persen dari total 83.953 desa/kelurahan di Indonesia.

Posbankum berfungsi sebagai pintu pertama layanan hukum bagi masyarakat, mulai dari informasi dan konsultasi hukum, mediasi sengketa oleh paralegal dan kepala desa/lurah sebagai juru damai, hingga rujukan advokat pro bono maupun melalui PBH. Mekanisme ini memperkuat ekosistem bantuan hukum, karena kasus-kasus sederhana dapat diselesaikan langsung di tingkat lokal, sehingga hanya perkara kompleks yang dirujuk ke PBH.

Data aplikasi Pelaporan Layanan Posbankum menunjukkan bahwa lebih dari 2.500 permasalahan hukum telah ditangani di Jawa Tengah. Isu yang paling sering muncul meliputi sengketa tanah, kamtibmas, penganiayaan, pencurian, hutang-piutang, KDRT, waris, perlindungan anak, dan perkawinan.

Sebagai bentuk apresiasi, Rekor MURI diberikan kepada Wakil Gubernur Jawa Tengah dan Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Jawa Tengah atas capaian sebagai provinsi dengan jumlah Posbankum terbanyak di Indonesia. “Terima kasih kepada seluruh jajaran Kanwil Kemenkum Jawa Tengah, organisasi PBH, para paralegal, kepala desa dan lurah, serta masyarakat yang telah mendukung implementasi Posbankum. Dengan Posbankum yang kini hadir di seluruh desa dan kelurahan Jawa Tengah, kita memastikan bahwa akses keadilan bukan hanya slogan, tetapi layanan nyata yang dapat dirasakan seluruh masyarakat,” ujar Supratman.

Capaian 100 persen ini menjadi tonggak penting hadirnya negara hingga ke tingkat paling dekat dengan masyarakat, sekaligus meneguhkan komitmen pemerintah dalam membangun keadilan yang inklusif, substantif, dan berorientasi pada kebutuhan rakyat.

Duta Posbankum, Sherly Tjoanda Laos, mengapresiasi keberhasilan pembentukan 8.653 Posbankum di Jawa Tengah yang menurutnya hanya terwujud berkat sinergi banyak pihak. Ia menilai kehadiran Posbankum menjadi ruang aman bagi masyarakat sekaligus mematahkan anggapan bahwa hukum itu rumit. “Banyak orang bilang hukum itu ribet, tapi Posbankum membuatnya lebih humanis dan menjadi pintu pertama menuju keadilan,” ujarnya. Sherly juga menegaskan bahwa hukum harus tetap berpihak pada keadilan. “Hukum adalah jalan, keadilan tujuannya. Tanpa keadilan, hukum hanya tulisan di atas kertas,” katanya.

Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, menyebut pendampingan hukum dulu hanya tersedia di kota besar sehingga warga harus menempuh jarak jauh.

“Dengan adanya Posbankum, keadilan kini lebih merata dan mudah diakses,” ujarnya. Ia menekankan pentingnya mendorong masyarakat untuk berani mengadu. “Kami bersama seluruh pihak akan terus memberi edukasi agar warga mau menyampaikan permasalahan hukumnya,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah, Heni Susila Wardoyo, menyebut dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sangat menentukan dalam percepatan pembentukan Posbankum. “Pembentukan Posbankum di Jawa Tengah mendapat dukungan besar dari Gubernur melalui nota kesepakatan sinergi,” ujarnya. Ia menambahkan, nota kesepakatan tersebut menjadi dasar bersama dalam membentuk Posbankum di seluruh desa dan kelurahan di Jawa Tengah.

Secara terpisah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Alex Cosmas Pinem, menyampaikan apresiasi atas capaian Provinsi Jawa Tengah yang berhasil mewujudkan 100 persen Pos Bantuan Hukum di seluruh desa dan kelurahan. Menurutnya, keberhasilan tersebut menjadi bukti nyata bahwa dengan sinergi kuat antara pemerintah daerah, PBH, paralegal, serta masyarakat, negara dapat benar-benar menghadirkan akses keadilan yang cepat, mudah, dan dekat.

Alex menegaskan bahwa pencapaian tersebut menjadi inspirasi bagi seluruh provinsi, termasuk Kalimantan Selatan yang juga sudah mencapai 100 persen untuk tetap menjaga keberlanjutan layanan bantuan hukum berbasis desa. “Posbankum adalah ruang aman bagi masyarakat untuk memperoleh solusi hukum secara damai dan humanis. Kami di Kalimantan Selatan berkomitmen mengikuti arah kebijakan nasional agar semakin banyak warga yang merasakan hadirnya negara dalam penyelesaian masalah hukum mereka,” ujarnya.



20 November 2025

Kemenkum Kalsel Terima Tim Ditjen AHU untuk Koordinasi Penguatan Layanan Daktiloskopi



Banjarmasin, Humas_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Kalimantan Selatan menerima rencana kedatangan Tim Direktorat Pidana Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) dalam rangka melaksanakan koordinasi pendahuluan terkait penguatan layanan jasa hukum di bidang daktiloskopi. Kegiatan koordinasi tersebut akan berlangsung pada 19 s.d. 22 November 2025 di lingkungan Kanwil Kemenkum Kalsel.

Koordinasi ini merupakan tindak lanjut kebijakan peningkatan layanan Sidik Jari sesuai Permenkumham Nomor 1 Tahun 2024 mengenai Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dalam pelaksanaannya, Direktorat Pidana Ditjen AHU memiliki mandat untuk melakukan pembinaan teknis, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelayanan daktiloskopi yang menjadi salah satu instrumen penting dalam layanan administrasi hukum.

Melalui kegiatan koordinasi pendahuluan ini, tim Ditjen AHU akan melakukan penguatan pada aspek layanan daktiloskopi, mulai dari tata cara pelayanan, pemeriksaan data sidik jari, analisis daktiloskopi hukum, hingga penyesuaian standar pelayanan di daerah.

Adapun tim dari Direktorat Pidana yang dijadwalkan hadir terdiri dari: 1. Taufiqurrahkman – Direktur Pidana; 2. Kurnia Banani Adam – Kepala Subdirektorat Daktiloskopi; 3. Triyuli Hendriyani – Perancang Peraturan Perundang-undangan Pertama; dan 4. Fifi Febiola Damanik – Analis Hukum Pertama.

Kepala Kanwil Kemenkum Kalsel, Alex Cosmas Pinem, menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan koordinasi ini dan siap mendukung penuh langkah penguatan layanan daktiloskopi di wilayah Kalimantan Selatan.

“Koordinasi ini sangat penting untuk memastikan keseragaman standar layanan daktiloskopi dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.

Dengan adanya kegiatan koordinasi ini, Kanwil Kemenkum Kalsel berharap layanan daktiloskopi di daerah semakin optimal, akurat, dan berjalan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.



20 November 2025

Kemenkum Kalsel Gelar Rapat Harmonisasi Dua Ranperbup Hulu Sungai Tengah, Bahas Kesehatan dan Pelayanan Daerah



Banjarmasin, Humas_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan melalui Tim Kerja Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah menggelar Rapat Harmonisasi dua Rancangan Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah (HST), Kamis (20/11/2025), bertempat di Balai Pertemuan Garuda.

Rapat dipimpin oleh Ketua Tim Kerja, Bahjatul Mardhiah, dan dihadiri oleh JFT Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kalsel, Dinas Kesehatan Kabupaten HST, Bagian Pemerintahan Setdakab HST, serta Bagian Hukum Setdakab HST.

Dua rancangan yang dibahas meliputi Rancangan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Tuberkulosis (TB) dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal serta Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Daerah Tahun 2025–2029.

Pada kesempatan tersebut, Mualim, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten HST, memaparkan latar belakang penyusunan rancangan terkait penanggulangan tuberkulosis. Ia menekankan pentingnya keterlibatan lintas sektor dan masyarakat dalam upaya menekan kasus TB di daerah.

Para Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kalsel kemudian memberikan sejumlah masukan teknis, mulai dari penulisan judul, konsiderans, batang tubuh, hingga bagian penutup. Tim menyarankan penyesuaian substansi terkait pembentukan tim percepatan serta penguatan peran pemerintah desa dalam mendukung penanggulangan tuberkulosis.



Sementara itu, pada pembahasan Ranperbup tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM), masukan difokuskan pada penyelarasan substansi agar lebih tepat menjadi Rencana Aksi Penerapan SPM Daerah Tahun 2025–2029 sesuai ketentuan yang berlaku.

Rapat berjalan dengan lancar dan ditutup kembali oleh pimpinan rapat. Seluruh tanggapan dan catatan harmonisasi akan dituangkan dalam analisis konsepsi untuk menjadi bahan perbaikan bagi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Dengan terselenggaranya rapat ini, diharapkan penyusunan regulasi daerah dapat semakin berkualitas, terarah, dan sesuai dengan standar peraturan perundang-undangan.



20 November 2025

157 Desa/Kelurahan di Tanah Bumbu Terima STR Posbankum, Kemenkum Kalsel Apresiasi Komitmen Daerah Wujudkan Akses Keadilan



Tanah Bumbu, P3H_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan menghadiri sekaligus menyerahkan Surat Tanda Register (STR) atas terbentuknya Pos Bantuan Hukum (Posbankum) pada 157 desa/kelurahan di Kabupaten Tanah Bumbu. Acara berlangsung di Pendopo Bupati Tanah Bumbu pada Rabu (19/11/2025).

Kehadiran Kanwil Kemenkum Kalsel dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah, Alex Cosmas Pinem, didampingi Kepala Divisi Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H), Anton Edward Wardhana, serta Tim Penyuluh Hukum. Kegiatan ini merupakan hasil inisiasi Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu sebagai tindak lanjut atas pembentukan Posbankum di seluruh wilayah desa/kelurahan setempat.

Acara dihadiri oleh Bupati Tanah Bumbu, Andi Rudi Latif, unsur Forkopimda Kabupaten Tanah Bumbu, seluruh SKPD, para Camat, serta Kepala Desa dan Lurah dari seluruh kecamatan yang ada di wilayah tersebut.

Dalam sambutannya, Kepala Kantor Wilayah menyampaikan apresiasi atas langkah progresif Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu yang berhasil mewujudkan 100% pembentukan Posbankum pada seluruh desa/kelurahan sejak September 2025.

“Langkah ini merupakan komitmen Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dalam mewujudkan supremasi hukum, menghadirkan layanan bantuan hukum yang dekat, terjangkau, dan responsif bagi masyarakat,” ujar Alex Cosmas Pinem.

Ia menekankan bahwa Posbankum adalah instrumen penting negara dalam memenuhi rasa keadilan dan memberikan ruang penyelesaian sengketa secara damai, sebagaimana esensi negara hukum yang ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.

Sementara itu, Bupati Tanah Bumbu mengucapkan terima kasih atas pendampingan intensif dari Kanwil Kemenkum Kalsel dalam proses pembentukan Posbankum. Bupati menyampaikan komitmen pemerintah daerah untuk terus meningkatkan efektivitas program “Rumah Aksi Damai”, di mana Posbankum menjadi salah satu layanan prioritas bagi masyarakat.

Setelah sambutan, kegiatan dilanjutkan dengan penyerahan resmi STR Posbankum dari Kakanwil kepada Bupati Tanah Bumbu, kemudian dilanjutkan dengan sosialisasi layanan Posbankum kepada para peserta.

Kegiatan berlangsung lancar dan menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara Kanwil Kemenkum Kalsel dan Pemerintah Daerah dalam pembangunan hukum dan pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Tanah Bumbu.



21 November 2025

Kemenkum Kalsel Serahkan 17 Sertifikat Merek untuk UMKM Kabupaten Tabalong



Banjarmasin, KI_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan kembali menunjukkan komitmennya dalam mendorong tumbuhnya ekosistem perlindungan Kekayaan Intelektual (KI) di daerah. Pada Kamis (20/11/2025), Kanwil Kemenkum Kalsel melalui Tim Layanan Kekayaan Intelektual menyerahkan 17 Sertifikat Merek kepada para pelaku UMKM di Kabupaten Tabalong.

Penyerahan dilakukan secara simbolis kepada Kepala Bagian Tata Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong yang hadir mewakili Pemerintah Daerah. Sertifikat tersebut merupakan bentuk perlindungan hukum atas merek dagang milik 17 UMKM yang telah melalui proses pendaftaran dan verifikasi pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

Plh. Kepala Divisi Pelayanan Hukum menyampaikan bahwa sertifikat merek ini menjadi instrumen penting untuk meningkatkan daya saing produk lokal. Dengan adanya perlindungan hukum, para pelaku usaha dapat lebih percaya diri dalam memasarkan produk sekaligus menghindari potensi sengketa atau peniruan merek.

“Pelindungan KI, khususnya merek, adalah fondasi bagi UMKM untuk berkembang. Kami berharap semakin banyak pengusaha di daerah, terutama UMKM, yang sadar pentingnya mendaftarkan merek agar usahanya memiliki nilai tambah dan perlindungan yang kuat,” ujarnya.

Kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya Kanwil Kemenkum Kalsel untuk memperluas akses layanan KI serta mendukung program pemerintah dalam penguatan UMKM melalui fasilitasi pendaftaran dan peningkatan pemahaman tentang Kekayaan Intelektual.

Dengan terlaksananya kegiatan ini, Tim Layanan Kekayaan Intelektual Kanwil Kemenkum Kalsel akan melaporkan hasil dan tindak lanjutnya kepada pimpinan sebagai bagian dari peningkatan kualitas layanan KI di wilayah Kalimantan Selatan.



21 November 2025

Kanwil Kementerian Hukum Kalimantan Selatan Ikuti Sosialisasi Verifikasi Substantif Perubahan Data Perseroan Terbatas



Banjarmasin, Humas_Info - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan melalui Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum (AHU) mengikuti kegiatan Sosialisasi Pelaksanaan Verifikasi Substantif terhadap Transaksi Perubahan Data Perseroan Terbatas yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum pada Jumat (21/11/2025). Kegiatan berlangsung secara daring melalui Zoom Meeting dan diikuti oleh Kepala Bidang Pelayanan AHU beserta tim.

Dalam paparannya, Direktur Badan Usaha, Andi Taletting Langi, menjelaskan bahwa verifikasi substantif merupakan langkah penting untuk memastikan setiap perubahan data perseroan sesuai dengan dokumen aslinya. Selama ini sistem AHU Online mengandalkan mekanisme self-declaration, namun tanpa verifikasi mendalam ditemukan sejumlah permasalahan seperti ketidaksesuaian data dengan akta, peralihan saham tanpa sepengetahuan pemegang saham lain, hingga dokumen pendukung yang tidak lengkap. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan sengketa dan kerugian bagi notaris, pemegang saham, maupun Kementerian Hukum.

Melalui mekanisme verifikasi substantif, Ditjen AHU melakukan pemeriksaan lebih teliti terhadap dokumen dan data yang diajukan tanpa menilai sah atau tidaknya akta. Pemeriksaan difokuskan pada akurasi data input, kelengkapan dokumen pendukung, serta kesesuaian jenis transaksi dengan ketentuan. Sistem juga dilengkapi fitur notifikasi kepada email para pemegang saham untuk mencegah adanya perubahan data tanpa sepengetahuan pihak terkait.

Penerapan verifikasi substantif ini diharapkan mampu menjaga validitas data perseroan, memperkuat kepastian hukum, dan menciptakan iklim usaha yang sehat serta terpercaya. Selain itu, langkah ini menjadi bentuk perlindungan bagi para notaris dan pemegang saham dari potensi sengketa.

Kegiatan ditutup dengan sesi diskusi yang membahas berbagai kendala teknis serta klarifikasi terkait pelaksanaan verifikasi substantif di lapangan.





**KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN SELATAN**

**#bangga
melayani
bangsa**



Terhubung lebih dekat:  YouTube    [kemenkumkalsel](https://www.kemenkumkalsel.go.id)